



Media: Kompas

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Januari 2009

Halaman: A

tanggal 23-01-09

### ◆ Indikator "Kompas"

#### Keterbukaan Birokrasi Dukung Pencegahan Korupsi

**K**eberhasilan Kota Yogyakarta terpilih sebagai kota terbersih dari perilaku korupsi, tidak lepas dari keberhasilan pemerintah kota melakukan reformasi birokrasi. Keterbukaan pengurusan berbagai izin dan pelayanan publik tak urung membentuk persepsi yang baik terhadap upaya pemerintah kota dalam mencegah korupsi.

Terpilihnya Yogyakarta sebagai kota terbersih sebenarnya dirintis sejak 2006. Pada tahun itu mulai dibentuk Dinas Perizinan yang merupakan pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Unit pelayanan terpadu satu atap itu sendiri sudah terbentuk sejak 2000.

Upaya membentuk Pelayanan UPTSA dan Dinas Perizinan yang berjalan baik membawa Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat penghargaan Citra Pelayanan Prima 2008. Penghargaan yang diterima pemerintah kota membentuk persepsi positif mengenai keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga akhirnya—seperti yang pernah terjadi pada kota lain—membentuk persepsi pelaku bisnis bahwa birokrasi di Kota Yogyakarta relatif bebas dari korupsi.

Persepsi pelaku bisnis terhadap prosedur pelayanan umum, pengajuan izin usaha, dan proses birokrasi secara keseluruhan merupakan komponen yang dijadikan unsur dalam menilai perilaku korupsi sebuah pemerintahan di daerah.

Dari 50 kota yang disurvei dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2008, Yogyakarta mendapat skor tertinggi yaitu 6,43. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa pelaku bisnis di Yogyakarta menilai pemerintah daerah cukup bersih dan cukup serius dalam usahanya memberantas korupsi. Persepsi kalangan usaha bahwa pemerintahan daerah di kota cukup bersih dan serius memberantas korupsi juga lebih baik ketimbang hasil survei sebelumnya (2006) (lihat Grafik). (BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

IPK Indonesia 2006 dan 2008 di Beberapa Kota

	IPK 2006	IPK 2008
Palangkaraya	6,61	6,43
Yogyakarta	5,59	6,10
Kupang	5,51	5,87
Banjarmasin	4,93	5,41
Banda Aceh	4,69	5,11
Medan	4,67	5,11
Pekanbaru	4,43	4,06
Jakarta	4,00	3,84
Pontianak	3,95	3,81
Medan	3,81	3,55
Pekanbaru	3,42	2,97
Kupang		2,97

Sumber: Transparency International Indonesia

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dharma Wanita Persatuan			

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005